

ANALISIS JARINGAN KERJA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) KAPAL PENANGKAP IKAN DI PPP TASIKAGUNG, REMBANG

*Analysis of the Work Network for Issuing Sailing Approval Letters (SPB) for Fishing Vessels at
PPP Tasikagung, Rembang*

Oleh:

Irvan Nur Rokhim^{1*}, Izza Mahdiana Apriliani¹, Ine Maulina¹, Pringgo Kusuma Dwi
Noor Yadi Putra²

¹Program Studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Universitas Padjadjaran, Jl. Ir Soekarno km. 21
Jatinangor, Sumedang 45363, Indonesia

²Program Studi Perikanan Laut Tropis, Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran, Jl. Cintaratu,
Parigi, Pangandaran 46393, Indonesia

*Korespondensi penulis: irvan20003@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen penting yang harus dibawa kapal penangkap ikan saat akan berlayar. Sering terjadinya ketidakpastian waktu penerbitan SPB menjadi masalah bagi kapal yang sudah menjadwalkan keberangkatan sehingga mengakibatkan kerugian. Salah satu upaya untuk mengatasi ketidakpastian waktu yaitu dengan menganalisis jaringan kerjanya. Riset ini bertujuan untuk menerangkan jaringan kerja, menentukan jalur kritis dan menemukan faktor pendukung serta penghambat penerbitan SPB. Tahapan dan waktu penerbitan SPB dianalisis menggunakan jaringan kerja dengan *Critical Path Method* (CPM). Hasil riset memperlihatkan penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung membutuhkan waktu selama 81 menit dan berdasarkan perhitungan CPM dapat diselesaikan selama 56 menit dengan jalur kritis terletak pada kegiatan: 1) Pengajuan melalui aplikasi e-PIT (A), 2) Pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan (C), 3) Penyusunan laporan administratif (E), 4) Validasi pemeriksaan administratif, teknis dan nautis (F), 5) Pencetakan SPB (G), 6) SPB diberikan kepada nelayan (H). Faktor-faktor yang memengaruhi penerbitan SPB terdiri dari faktor pendukung (hukum dan koordinasi antara instansi) dan faktor penghambat (sistem teknologi, ketidakcermatan pemohon dan cuaca).

Kata kunci: CPM, faktor pengaruh, penerbitan SPB

ABSTRACT

The Sailing Approval Letter (SPB) is an important document that fishing vessels must carry when sailing. Frequent uncertainty about the timing of SPB issuance becomes a problem for ships that have scheduled departures, resulting in losses. One effort to overcome time uncertainty is by analyzing the work network. This research aims to explain the working network, determine the critical path and find supporting and inhibiting factors for the issuance of SPB. The stages and timing of SPB issuance were analyzed using a network with the Critical Path Method (CPM). The research results show that the issuance of SPB at the Tasikagung PPP harbormaster's office takes 81 minutes and based on CPM calculations it can be completed in 56 minutes with the critical path lying in the activities: 1) Submission via the e-PIT (A) application, 2) Inspection and verification of required documents (C), 3) Preparation of administrative reports (E), 4) Validation of administrative, technical and nautical

inspections (F), 5) Printing of SPB (G), 6) SPB given to fishermen (H).. The factors that influence SPB issuance consist of supporting factors (law and coordination between agencies) and inhibiting factors (technological systems, applicant carelessness and weather).

Key words: CPM, influence factors, SPB issuance

PENDAHULUAN

Setiap kapal penangkap ikan yang berbendera Indonesia memerlukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada saat akan melakukan operasi penangkapan ikan (Kirwelakubun *et al.* 2018). Surat tersebut diterbitkan dan disahkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan agar dapat berlayar untuk menangkap ikan di laut dan bersandar di sebuah pelabuhan perikanan untuk bongkar muat ikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan menyatakan bahwa kapal harus memiliki SPB dengan memenuhi syarat administratif, nautis, teknis kapal, alat bantu penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan. Kesyahbandaran mempunyai peran vital dalam penerbitan SPB di pelabuhan perikanan salah satunya mengeluarkan dan mengesahkan (Putri *et al.* 2016). Selain pelayanan yang berupa fasilitas, pelabuhan perikanan juga memberi pelayanan kepada nelayan berupa kebutuhan untuk melaut melalui kantor syahbandar pelabuhan perikanan berupa penerbitan SPB, perbekalan kapal yang dibutuhkan serta kebutuhan saat kapal akan bersandar di pelabuhan (Adlina *et al.* 2019). Salah satu pelabuhan perikanan yang menerbitkan SPB bagi kapal penangkap ikan yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung yang berada di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

Penerbitan SPB bagi kapal merupakan salah satu bentuk dukungan dalam peningkatan dan pengembangan operasi penangkapan ikan (Burhani *et al.* 2021). Berdasarkan kondisi lapangan di PPP Tasikagung, penerbitan SPB sering kali terjadi ketidakpastian waktu penerbitan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan jadwal keberangkatan kapal dalam operasi penangkap ikan. Ketidakpastian waktu penerbitan tersebut dikarenakan salah satunya Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan SPB yang sudah ada di PPP Tasikagung tidak dijalankan dengan baik sehingga terjadi kendala dalam penerbitan SPB. Menurut Teturan dan Megawati (2021) kendala penerbitan SPB di Pelabuhan Perikanan dapat terjadi di antaranya karena SOP yang tidak dijalankan dengan baik ataupun pemilik kapal yang tidak mempersiapkan persyaratan yang lengkap.

Salah satu upaya untuk menanggulangi ketidaksesuaian SOP penerbitan SPB yang ada di PPP Tasikagung yaitu dengan menggunakan analisis jaringan kerja. Menurut Purba (2021) kelebihan penggunaan analisis jaringan kerja yaitu didapatkan perencanaan yang optimal pada suatu mekanisme, urutan penjadwalan yang efisien dan praktis, sehingga hambatan dan keterlambatan dapat dikendalikan. Hasil observasi di PPP Tasikagung bahwa pihak pelabuhan perikanan belum pernah melakukan evaluasi jaringan kerja untuk menanggulangi ketidaksesuaian SOP penerbitan SPB. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis jaringan kerja pada mekanisme penerbitan SPB untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan penerbitan SPB kapal penangkap ikan di PPP Tasikagung.

Tujuan secara spesifik dari riset ini yaitu (1) menerangkan jaringan kerja dan menemukan kegiatan apa saja yang menjadi jalur kritis atau jalur yang mempunyai sekelompok bagian kegiatan dengan jangka waktu tercepat dan terlama dalam penyelesaiannya pada kegiatan penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung dengan menggunakan *Critical Path Method* (CPM); (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya penerbitan SPB. Hasil riset diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan monitoring pada pengelolaan dan mekanisme penerbitan SPB serta meminimalisir kerugian nelayan akibat keterlambatan penerbitan SPB di PPP Tasikagung.

METODE PENELITIAN

Riset lapangan dilaksanakan pada bulan Desember 2023-Januari 2024 di kantor syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Gambar 1) dengan menggunakan metode studi kasus. Kasus dalam riset ini yaitu kendala dalam penerbitan SPB yang mengakibatkan keterlambatan jadwal keberangkatan kapal penangkap ikan di PPP Tasikagung. Data primer yang diambil berupa tahapan dan waktu setiap kegiatan penerbitan SPB yang diperoleh melalui pengamatan langsung di kantor syahbandar PPP Tasikagung dan wawancara kepada 21 responden yang terdiri dari 6 pegawai syahbandar dan 15 anggota paguyuban pengurus berkas kapal yang terlibat langsung dalam penerbitan SPB. Data yang di dapatkan diolah menggunakan analisis jaringan kerja dengan *Critical Path Method* (CPM). Menurut Amalia (2020) langkah-langkah analisis jaringan kerja dengan CPM terdiri dari:

1. Penyusunan tata urutan kegiatan

Tata urutan kegiatan merupakan komponen penting dalam membuat analisis jaringan kerja. Penyusunan tata urutan kegiatan harus sesuai urutan logika antar ketergantungan menjadi jaringan kerja.

2. Perkiraan waktu masing-masing kegiatan

Hasil dari tata urutan kegiatan dapat ditentukan waktu masing-masing kegiatan. Pada proses ini, data yang dibutuhkan berupa perhitungan waktu setiap komponen kegiatan penerbitan SPB di PPP Tasikagung yang sudah diurutkan dari awal sampai akhir. Urutan dan waktu kegiatan yang sudah didapat kemudian dirangkai ke dalam bentuk diagram jaringan kerja.

3. Pengidentifikasian jalur kritis

Pengidentifikasian jalur kritis dapat dilakukan setelah penyusunan diagram jaringan kerja dengan melakukan perhitungan menggunakan metode algoritma sehingga didapatkan jalur kritis yang menghambat kegiatan serta waktu penyelesaian total kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan penerbitan SPB. Jalur kritis tersebut kemudian dirangkai ke dalam bentuk diagram jalur kritis.

Menurut Utomo dan Mulyono (2021), metode Algoritma dapat digunakan dalam perhitungan CPM dengan rumus sebagai berikut:

$$ES = EF^{-1} \quad (1)$$

$$EF = ES + t \quad (2)$$

$$LF = LS^{-1} \quad (3)$$

$$LS = LF - t \quad (4)$$

Keterangan:

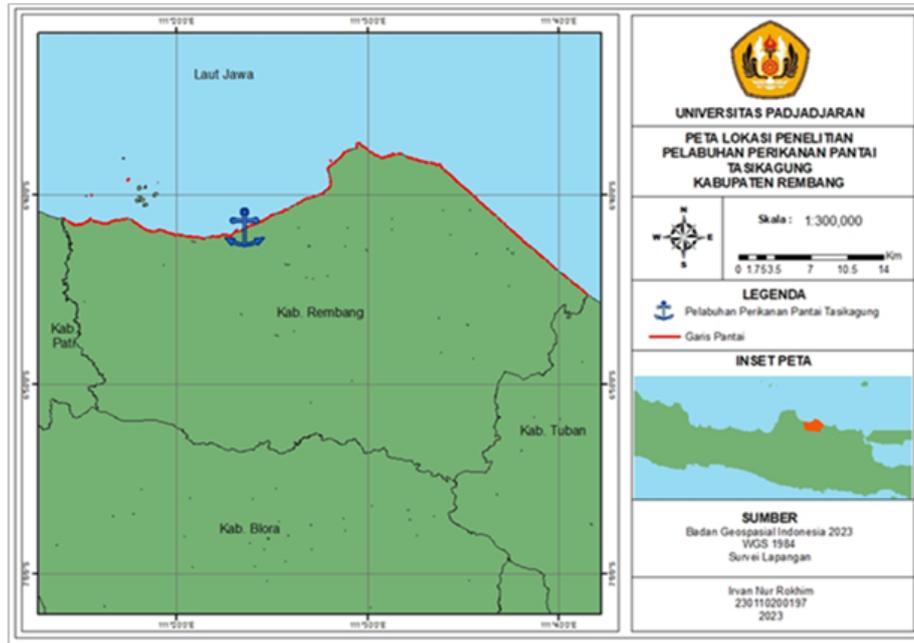
ES = *Earliest Start Time*

EF = *Earliest Finish Time*

LF = *Latest Finish Time*

LS = *Latest Start Time*

t = Waktu



Gambar 1 Peta lokasi riset

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor syahbandar PPP Tasikagung merupakan instansi yang dibentuk oleh pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai fungsi pengawasan langsung terhadap aktivitas kapal penangkap ikan yang akan berlayar maupun bersandar di pelabuhan. Menurut Turang *et al.* (2019) menjelaskan bahwa kantor syahbandar berfungsi sebagai pengawas terhadap kapal-kapal yang akan keluar dan masuk pelabuhan serta wajib mematuhi peraturan yang ada untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas kapal di pelabuhan. Sebagai pengawas kapal penangkap ikan yang ada di Kabupaten Rembang, kantor syahbandar PPP Tasikagung berwenang untuk mengeluarkan perizinan administratif kepada setiap kapal yang melakukan aktivitas di pelabuhan. Kantor syahbandar PPP Tasikagung memiliki 6 pos pelayanan administratif yang terdiri dari pos penerbitan Surat Tanda Setoran (STS) retribusi daerah, penerbitan Surat Keterangan (SK) BBM, pembayaran jaminan sosial, penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK), penerbitan SPB dan penerbitan Lembar Awal (LA). Pos pelayanan penerbitan SPB merupakan salah satu pos penting dalam kantor syahbandar PPP Tasikagung karena melayani kapal penangkap ikan yang akan berangkat melakukan operasi penangkapan ikan dengan rata-rata jumlah penerbitan SPB adalah 15 berkas kapal per hari.

Sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi untuk nelayan yang ada di kantor syahbandar PPP Tasikagung dikelola dan dirawat dengan baik untuk menghindari kerusakan dan membuat kenyamanan bagi pegawai. Menurut Supriadi dan Fitri (2019) menjelaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana yang baik sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pegawai untuk melayani pemohon. Komputer dan printer merupakan komponen penting yang di bagi ke beberapa pos pelayanan kesyahbandaran untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada nelayan yang akan mengurus perizinan administratif.

Pegawai yang ada di kantor syahbandar PPP Tasikagung berjumlah 26 orang dengan pembagian tugas sesuai struktur organisasi berupa sub bagian tata usaha mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pelabuhan dan kesyahbandaran seperti penyusunan anggaran, kepegawaian, hukum, pelaksanaan program, keuangan, pelaksanaan pengendalian lingkungan, barang milik negara, evaluasi dan pelaporan. Bagian seksi tata kelola dan pelayanan usaha bertugas

melaksanakan pengawasan, pengembangan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian dan pendayagunaan sarana serta prasarana yang ada di pelabuhan. Bagian seksi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran bertugas melakukan pengumpulan data, publikasi, informasi, inspeksi, bimbingan teknis dan pengaturan administrasi dan lalu lintas bagi kapal yang akan berangkat maupun bersandar di pelabuhan. Sedangkan kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok jabatan yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi tertentu dalam pelabuhan atau kelompok jabatan yang opsional menurut apa yang dibutuhkan (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018).

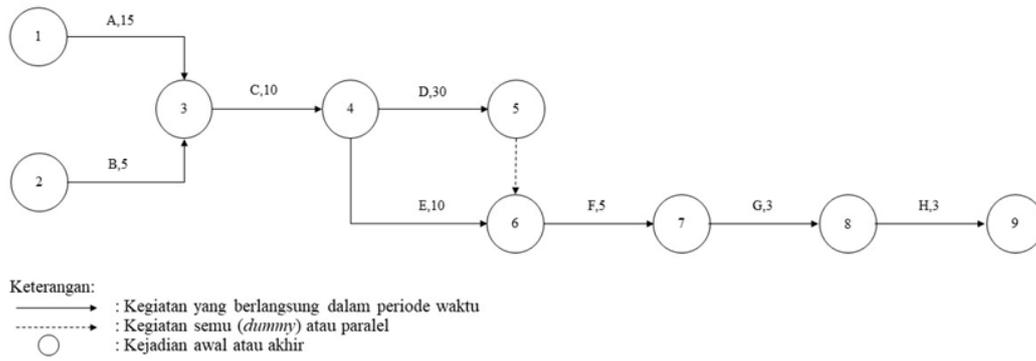
Analisis Jaringan Kerja Penerbitan SPB

Tahapan penerbitan SPB mengacu pada SOP yang sudah ada di kantor syahbandar PPP Tasikagung sedangkan perhitungan waktu setiap kegiatan penerbitan SPB dilakukan observasi langsung di kantor syahbandar dengan mengikuti rangkaian kegiatannya. Langkah tersebut bertujuan untuk merincikan, menghitung waktu dan membuat logika ketergantungan setiap kegiatan penerbitan SPB secara detail (Tabel 1). Menurut Perdana dan Rahman (2019) menjelaskan bahwa penentuan tahapan dan perhitungan waktu suatu kegiatan sangat penting dilakukan agar semua kegiatan dapat berjalan secara sistematis sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan dapat memperlihatkan hubungan antara kegiatan dengan kegiatan lainnya serta dapat menunjukkan perkiraan waktu sebenarnya untuk setiap kegiatan.

Tabel 1. Tahapan dan waktu penerbitan SPB

No	Nama Kegiatan	Kode	Kegiatan Pendahulu	Lama Kegiatan (Menit)
1	Pengajuan melalui aplikasi <i>e</i> -PIT	A	-	15
2	Penyerahan dokumen persyaratan ke kantor syahbandar	B	-	5
3	Pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan	C	A,B	10
4	Pemeriksaan teknis dan nautis kapal	D	C	30
5	Penyusunan laporan administratif	E	C	10
6	Validasi pemeriksaan administratif, teknis dan nautis	F	D,E	5
7	Pencetakan SPB	G	F	3
8	SPB diberikan ke nelayan	H	G	3

Berdasarkan Tabel 1 tahapan penerbitan SPB terdiri atas 8 kegiatan yang dimulai dari pengajuan mandiri oleh nakhoda atau pengurus kapal melalui aplikasi *elektronik*-Penangkapan Ikan Terukur (*e*-PIT) yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan meliputi pengisian identitas kapal, daftar perbekalan dan anak buah kapal serta pengunggahan dokumen penunjang seperti foto kapal, mesin, alat tangkap dan alat keselamatan berlayar. Pengajuan melalui aplikasi *e*-PIT bisa dilakukan bersamaan dengan penyerahan dokumen persyaratan ke kantor syahbandar dan menunggu antrian. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi keabsahan dokumen melalui *website* teman SPB yang terintegrasi dengan aplikasi *e*-PIT dan syahbandar menunjuk petugas lain untuk melakukan pemeriksaan teknis dan nautis serta melakukan dokumentasi di atas kapal langsung untuk mengetahui kelayakan kapal tersebut untuk berlayar. Setelah menerima hasil pemeriksaan teknis maupun nautis, petugas administrasi menyusun laporan untuk diserahkan kepada kepala syahbandar untuk di validasi. Selanjutnya petugas akan mencetak laporan hasil validasi dari kepala syahbandar berupa SPB untuk diserahkan kepada nakhoda atau pengurus kapal. Tahapan kegiatan penerbitan SPB yang membutuhkan waktu paling lama yaitu pemeriksaan teknis maupun nautis yang dilakukan langsung di atas kapal. Hasil pemeriksaan tersebut dijadikan perbandingan dengan dokumentasi yang sudah di unggah mandiri oleh nakhoda atau pengurus kapal melalui aplikasi *e*-PIT. Tahapan dan waktu kegiatan penerbitan SPB digambarkan ke dalam diagram jaringan kerja yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Diagram jaringan kerja penerbitan SPB

Jalur Kritis Penerbitan SPB

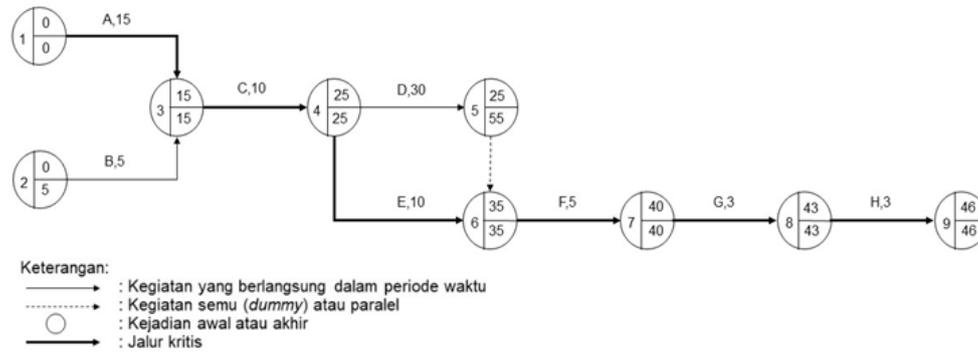
Perhitungan dan penentuan jalur kritis serta *slack* menjadi langkah selanjutnya setelah penyusunan hubungan antara kegiatan-kegiatan dan pembuatan diagram jaringan kerja penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung dengan menggunakan metode Algoritma yang terdiri dari *Earliest Start Time* (ES), *Latest Start Time* (LS), *Earliest Finish Time* (EF) dan *Latest Finish Time* (LF). *Slack* merupakan waktu untuk setiap kegiatan dapat diperpanjang tanpa menimbulkan keterlambatan pada keseluruhan proyek (Putra & Gandhi 2019). Lebih lanjut menurut Mulia *et al.* (2023) menjelaskan bahwa penentuan jalur kritis dapat dilakukan dengan perhitungan maju *Earliest Start Time* dan *Earliest Finish Time* dan perhitungan mundur *Latest Start Time* dan *Latest Finish Time* serta menghitung nilai *slack*-nya atau nilai batas toleransi keterlambatan. Perhitungan dikelompokkan ke dalam sebuah tabel untuk mempermudah penentuan jalur kritis. Perhitungan waktu kerja menggunakan metode algoritma penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah ES, EF, LS, LF dan *slack* penerbitan SPB

Kegiatan	Kode	t	ES (Menit) (1)	LS (Menit) (2)	EF (Menit) (3)	LF (Menit) (4)	<i>Slack</i> (1-2) atau (3-4)
A	1,3	15	0	0	15	15	0
B	2,3	5	0	10	5	15	10
C	3,4	10	15	15	25	25	0
D	4,5	30	25	10	55	40	15
E	4,6	10	25	25	35	35	0
F	6,7	5	35	35	40	40	0
G	7,8	3	40	40	43	43	0
H	8,9	3	43	43	46	46	0

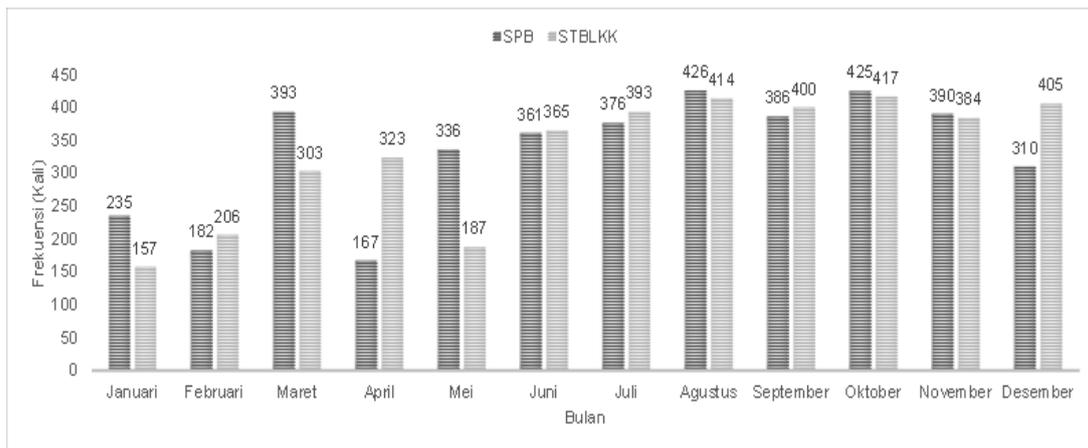
Hasil perhitungan menggunakan metode algoritma (Tabel 2) menunjukkan jalur kritis yang ditandai dengan nilai *slack* = 0 yang berarti kegiatan tersebut waktunya terbatas atau sempit. Menurut Putra dan Gandhi (2019) kegiatan kritis harus segera dimulai dan dilaksanakan setelah kegiatan sebelumnya selesai dilaksanakan. Sehingga kegiatan kritis dapat menyelesaikan waktunya tanpa harus mengganggu atau memperlambat waktu total kegiatan. Jalur kritis kegiatan penerbitan SPB kapal penangkap ikan di kantor syahbandar PPP Tasikagung terdapat pada kegiatan A-C-E-F-G-H yaitu pada kegiatan pengajuan melalui aplikasi *e-PIT* oleh nakhoda atau pengurus kapal, pengecekan dan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan oleh petugas, penyusunan laporan administratif oleh petugas, validasi pemeriksaan administratif, nautis dan teknis oleh kepala syahbandar, pencetakan SPB oleh petugas dan pemberian SPB kepada nelayan atau pengurus berkas kapal. Menurut Apriliani *et al.* (2016) menjelaskan bahwa kegiatan yang masuk ke dalam jalur kritis harus diutamakan untuk dikerjakan agar tidak terjadi keterlambatan. Penghematan waktu penerbitan SPB yang bisa didapatkan bila

memperhatikan jalur kritis yaitu selama 25 menit dari waktu perhitungan 81 menit menjadi 56 menit. Jalur kritis ditandai dengan anak panah tebal berwarna hitam. Hasil perhitungan menggunakan metode algoritma digunakan untuk membuat diagram jalur kritis disajikan pada Gambar 3. Pembuatan dan penyusunan jalur kritis menurut Apriliani *et al.* (2016) yaitu menuliskan ES di atas dan EF di bawah pada setiap kegiatan. Jika besarnya nilai ES sama dengan nilai EF maka kegiatan tersebut dapat masuk dalam jalur kritis. Jalur kritis penerbitan SPB dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Diagram jalur kritis penerbitan SPB

Ukuran kapal perikanan yang melakukan aktivitas di PPP Tasikagung berkisar antara 20-120 GT dengan alat tangkap berupa Jaring Tarik Berkantong (JTB) dan *purse seine*. Sepanjang tahun 2023 total produksi hasil tangkapan ikan sebesar 78.678.377 kg dengan nilai total produksi sebesar Rp623.969.898.520. Jumlah penerbitan SPB dan STBLKK selama tahun 2023 bervariasi. Jumlah penerbitan SPB tertinggi pada bulan Agustus sebesar 426 kapal dan penerbitan terendah pada bulan April sebesar 167 kapal. Sedangkan jumlah permohonan STBLKK tertinggi pada bulan Oktober sebesar 417 dan permohonan terendah pada bulan Januari sebesar 157 kapal. Tinggi dan rendahnya permohonan penerbitan SPB dan STBLKK dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti musim yang kurang mendukung untuk operasi penangkapan ikan dan waktu tertentu seperti hari besar nasional yang mengharuskan untuk menunda permohonan penerbitan SPB atau STBLKK dikarenakan kantor syahbandar tutup. Jumlah penerbitan STBLKK dan SPB disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4 Jumlah Penerbitan SPB dan STBLKK di Kantor Syahbandar PPP Tasikagung Sepanjang Tahun 2023 (Sumber: *Website* Teman SPB).

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerbitan SPB

Faktor-faktor yang memengaruhi penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung terdiri dari faktor pendukung atau faktor yang mempercepat dan faktor penghambat atau faktor yang menjadi gangguan yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Hukum

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas, fungsi dan tanggung jawab syahbandar dalam menerbitkan SPB kapal penangkap. Dasar hukum kegiatan penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu di kantor syahbandar PPP Tasikagung sudah terdapat SOP atau SPP penerbitan SPB dengan jaminan pelayanan ISO 9001: 2015. Menurut Alhogbi *et al.* (2018) menjelaskan bahwa pelaksanaan SOP penerbitan SPB dengan baik dapat mendukung kelancaran dan optimalnya waktu pelayanan serta menetapkan tanggung jawab setiap petugas untuk pelayanan penerbitan SPB.

b. Koordinasi Antara Instansi Terkait

Kantor syahbandar PPP Tasikagung dalam menerbitkan SPB berkoordinasi dengan berbagai instansi seperti kantor Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kabupaten Rembang, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Polisi Air (Polair). Lebih lanjut menurut Alhogbi *et al.* (2018) tugas dari PSDKP yaitu menerbitkan Surat Laik Operasi (SLO) sedangkan untuk tugas Keamanan Laut (Kamla) yang terdiri dari TNI AL dan Polair yaitu pengisian identitas kapal pada buku laporan kedatangan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi lampiran penerbitan SPB yang dapat diteruskan pada pos-pos pelayanan di kantor syahbandar pelabuhan. Koordinasi antara instansi yang baik akan memberikan dampak pelayanan yang baik dan cepat untuk kepengurusan sebuah dokumen. Sukrisno (2019) menambahkan untuk menunjang proses kerja yang mudah, cepat, aman dan nyaman pada pelaksanaan penerbitan SPB, seluruh instansi terkait harus saling terintegrasi dengan baik.

2. Faktor Penghambat

a. Sistem Teknologi

Sistem teknologi berupa aplikasi dan *website* yang digunakan untuk proses penerbitan SPB sering kali terjadi *error* sehingga mengakibatkan tersendatnya proses pelayanan penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung. *Website* yang di pakai petugas administrasi syahbandar untuk mengolah permohonan penerbitan SPB bernama Teman SPB yang terintegrasi dengan aplikasi android bernama *e-PIT*. Menurut Ruskamto *et al.* (2020) menjelaskan bahwa kualitas sistem teknologi terkhusus *website* yang baik, efektif dan efisien dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat atau pengguna jasa yang menggunakannya.

b. Ketidacermatan Pemohon

Ketidacermatan pemohon dapat menghambat proses penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung seperti *e-logbook* pada aplikasi *e-PIT* yang tidak diisi secara mandiri oleh nakhoda atau pengurus, terdapat kesalahan dalam mengunggah hasil produksi ikan, dokumen persyaratan tidak lengkap, masa berlaku dokumen kapal yang dikeluarkan oleh instansi lain sudah kedaluwarsa sehingga mengakibatkan pengajuan ditolak. Menurut Gunawan *et al.* (2023) menjelaskan tidak akan tercapai dengan maksimal sebuah kebijakan atau aturan apabila tidak terdapat kerja sama yang baik antara pemerintah dengan pengguna jasa atau masyarakat.

c. Cuaca

Cuaca yang buruk menjadi salah satu hambatan dalam penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung. Pihak syahbandar pelabuhan perikanan mempunyai wewenang dan tugas untuk memastikan keselamatan bagi awak kapal yang akan berlayar, sehingga ketika cuaca buruk syahbandar dapat menunda penerbitan SPB dan tidak akan mengizinkan kapal penangkap ikan untuk berlayar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan menjelaskan bahwa syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menunda keberangkatan kapal perikanan setelah SPB diterbitkan apabila cuaca buruk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis riset yang sudah dilakukan diperoleh kesimpulan berupa kantor syahbandar PPP Tasikagung Kabupaten Rembang sudah terkelola dengan baik dari segi pembagian struktur organisasi, sumberdaya manusia yang memadai dan kompeten, pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Jalur kritis penerbitan SPB kapal penangkap ikan di PPP Tasikagung pada kegiatan A-C-E-F-G-H yaitu berturut-turut pada kegiatan pengajuan permohonan melalui aplikasi e-PIT, pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan oleh petugas, penyusunan laporan administratif, validasi pemeriksaan administratif, teknis dan nautis oleh syahbandar, pencetakan SPB dan pemberian SPB ke nelayan. Penghematan waktu penerbitan SPB yang bisa didapatkan bila memperhatikan jalur kritis yaitu selama 25 menit dari waktu perhitungan 81 menit menjadi 56 menit. Faktor pendukung yang memengaruhi penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung berupa faktor hukum dan faktor koordinasi antara instansi. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari faktor sistem teknologi, ketidakcermatan pemohon dan cuaca.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih ditujukan kepada pihak kantor syahbandar PPP Tasikagung dan Paguyuban Pengurus Kapal Tasikagung yang sudah memberikan bantuannya selama riset.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, S. K., Abdul, K. M., Dian, W. 2019. Analisis Tingkat Kepuasan Nelayan Terhadap Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Melaut Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 8(4), 16–25.
- Alhogbi, B. G., Arbogast, M., Labrecque, M. F., Pulcini, E., Santos, M., Gurgel, H., Laques, A., Silveira, B. D., De Siqueira, R. V., Simenel, R., Michon, G., Auclair, L., Thomas, Y. Y., Romagny, B., Guyon, M., Sante, E. T., Merle, I., Duault, A. L., Anthropologie, U. N. E., Du, Q. 2018. Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Provinsi Jawa Tengah. *Gender and Development*, 120(1), 1-22.
- Amalia, H. 2020. Perencanaan Jaringan Kerja Perakitan Blok Lambung Kapal Feri Ro-Ro 750gt Terintegrasi Sistem Perpipaian Air Tawar & Air Laut untuk Pendingin Mesin. *PENA TEKNIK : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(1), 44-53
- Apriliani, I. M., Wisudo, S. H., Iskandar, B. H., Novita, Y. 2016. Jaringan Kerja dan Efektivitas Perbaikan Kapal di Galangan KPNDP DKI Jakarta, Muara Angke. *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 5(1), 79–89.
- Burhani, S., Amir, S. M., Syamsul, H. 2021. Tingkat Kepuasan Nelayan Terhadap Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Untia. *Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan*, 3(1), 443-445.
- Gunawan, T., Kurniawan, R., Muhaddis, M. 2023. Implementasi Kebijakan tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe). *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10 (1) : 155–166
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia [KKP RI]. 2013. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan*. Jakarta (ID): Sekretariat Menteri Kelautan dan Perikanan.

- Kirwelakubun, N., Kayadoe, M. E., Polii, J. F., Kaparang, F. F., Pangalila, F. P. T. 2018. Studi Tentang Pelayanan Terhadap Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa Kota Manado. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 3(1), 32–40.
- Mulia, T. N., Surbakti, S., Riny, C. 2023. Analisis Penjadwalan Proyek Menggunakan *Critical Path Method* (CPM) Studi Kasus pada Pembangunan Gapura Taman Hutan Lindung Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 82–90.
- Perdana, S., Rahman, A. 2019. Penerapan Manajemen Proyek Dengan Metode CPM (*Critical Path Method*) Pada Proyek Pembangunan SPBE. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 242–250.
- Pemerintah Jawa Tengah. 2018. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah*. Semarang (ID). Sekretariat Pemerintah Jawa Tengah.
- Purba, S. A. 2021. Analisis Jaringan Kerja dengan Metode *Critical Path Method* (CPM) dan Model Program Linier. *Jurnal Absis: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika*, 4(1), 429–438.
- Putra, Y. E., Gandhi, H. K. 2019. Analisis Jalur Kritis Pada Proyek Relokasi Mesin Flexo Dengan Metode CPM Dan Pert. *Jurnal InTent*, 2(1), 65–75.
- Putri, N. E., Soemarmi, A., Untung, D. W. 2016. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Syahbandar dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-8.
- Ruskamto, M., Anhar, M., Pragiwani, M. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Masyarakat Pada Kantor Administrasi Hukum Umum Cikini Jakarta (Kemenkumham). *STIE Indonesia Jakarta*, 1, 1-17.
- Sukrisno, C. D. P. 2019. Proses Pengurusan Perpanjangan Dokumen Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di KSOP Kelas III Tanjung Wangi Oleh PT Varia Usaha Lintas Seera TBK Cabang Banyuwangi. *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 2(1), 1-8.
- Supriadi, D., Fitri M. 2019. Tingkat Kepuasan Nelayan, Kesyahbandaran, Kejawatan Cirebon. *Barakuda*, 1(1), 18–26.
- Teturan, Y. E., Megawati. 2021. Pelayanan Administrasi Dokumen Kapal Perikanan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 10(2), 112–127.
- Turang, V. S., Kayadoe, M. E., Pangalila, F. P. T., Kaparang, F. E. 2019. Kajian Tugas Dan Wewenang Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 4(1), 10.
- Utomo, F. P., Mulyono. 2021. Penjadwalan Ulang Proyek Konstruksi Menggunakan Metode PDM Dan CPM (Studi Kasus Pada Pembangunan Toserba Yogya Di Pekalongan). *UNNES Journal of Mathematics*, 10(1), 63–72.